

Nama : Rizka Sari
NPM : 2226061013
Mata Kuliah : Analisis Kebijakan Publik
Dosen Pengampu : Intan Fitri Meutia, Ph.D.

1. Menjaga Stabilitas Perekonomian Nasional : Mengoptimalkan Peraturan Perpajakan melalui Perdagangan Sistem Elektronik untuk Memperkuat Pengumpulan Pajak yang adil dan efektif

Analisis Masalah

Perdagangan sistem elektronik (e-commerce) semakin berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini membuat kontribusi sektor ini dalam perekonomian semakin signifikan. Namun, terdapat masalah dalam pengumpulan pajak pada perdagangan e-commerce yang dapat mengancam stabilitas perekonomian nasional, yaitu (1) sulitnya memantau transaksi yang dilakukan dalam sistem e-commerce. Sebagian besar transaksi dilakukan secara digital dan terjadi tanpa adanya pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Hal ini membuat pengumpulan pajak pada transaksi e-commerce menjadi sulit, karena tidak ada cara mudah untuk memantau dan mengaudit transaksi secara manual.

(2) kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari pelaku e-commerce dalam membayar pajak. Beberapa pelaku e-commerce mungkin tidak menyadari bahwa mereka harus membayar pajak atas transaksi mereka, atau bahkan mencoba untuk menghindari pembayaran pajak dengan cara yang tidak sah.

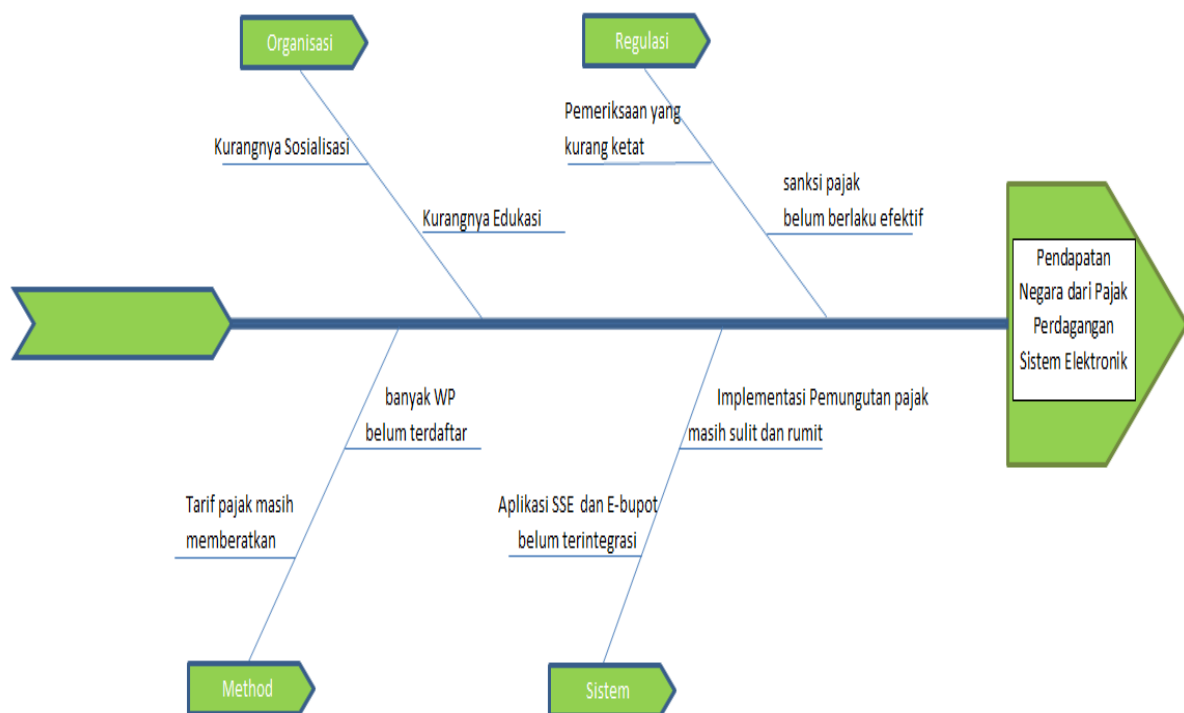
Jika masalah pengumpulan pajak pada perdagangan e-commerce tidak diselesaikan, maka akan ada dampak negatif pada perekonomian nasional. Pemerintah akan kehilangan pendapatan pajak yang seharusnya diterima dari transaksi e-commerce, sehingga mengurangi sumber pendapatan negara. Selain itu, ketidakadilan juga dapat terjadi karena pelaku usaha konvensional yang memenuhi kewajiban pajak mereka akan merasa dirugikan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menemukan cara yang efektif untuk mengumpulkan pajak dari transaksi e-commerce dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dari pelaku e-commerce dalam membayar pajak.

Rekomendasi Kebijakan

- a. Memperbarui peraturan perpajakan terkait e-commerce dan mengimplementasikannya secara ketat.
- b. Pemerintah juga dapat mengadopsi teknologi, seperti Blockchain yang dipakai pada Bitcoin, untuk memantau dan mengaudit transaksi e-commerce secara lebih efektif.
- c. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi terhadap pelaku e-commerce tentang kewajiban mereka dalam membayar pajak dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka.

- d. Meningkatkan pemeriksaan dan sanksi pajak terhadap pelaku usaha yang tidak mau membayar pajak



Gambar 1. Diagram Fishbone

2. Anak-anak dan remaja di Indonesia sebagai pengguna media digital dan end user application

Analisis Masalah

Anak-anak dan remaja saat ini semakin akrab dengan penggunaan internet dan media digital. Peningkatan penggunaan internet dan media digital oleh anak-anak dan remaja telah menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan pengguna. Kebanyakan dari mereka, menggunakan internet dan media digital untuk berkomunikasi dengan teman atau hanya sekedar bermain dan mengunduh aplikasi. Namun, sebagai pengguna yang sering kali belum memiliki pemahaman yang cukup tentang keamanan digital, mereka tidak berhati-hati ketika mengunduh aplikasi dan melakukan transaksi online. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kontrak End User License Agreement (EULA).

Kontrak EULA adalah perjanjian yang harus disetujui oleh pengguna ketika mereka ingin mengunduh atau menggunakan aplikasi atau perangkat lunak tertentu. Kontrak EULA seringkali memuat ketentuan dan persyaratan penggunaan yang harus dipatuhi oleh pengguna. Namun, ini dapat menjadi masalah karena beberapa EULA mengandung ketentuan yang merugikan pengguna, seperti memberikan izin kepada perusahaan untuk mengumpulkan data pribadi atau

memperbolehkan akses ke informasi sensitif pengguna. Dalam beberapa kasus, ketentuan ini bahkan dapat melanggar hak-hak privasi dan keamanan pengguna. Seringkali anak-anak dan remaja tidak membaca EULA dengan seksama dan hanya menyetujui tanpa memahami isinya.

Oleh karena itu, sangat penting bagi anak-anak dan remaja untuk memahami dengan jelas isi EULA sebelum menyetujuinya. Para orang tua dan wali juga harus memberikan edukasi dan pengawasan terhadap penggunaan internet dan media digital oleh anak-anak dan remaja. Mereka dapat memastikan bahwa anak-anak dan remaja memahami risiko dan bahaya yang terkait dengan penggunaan internet, serta memberikan bimbingan tentang cara menggunakan internet dan media digital dengan aman. Dalam hal ini, peran perusahaan juga penting untuk menjaga keamanan pengguna dengan mengeluarkan EULA yang jelas dan mudah dipahami. Perusahaan harus memberikan informasi yang cukup tentang ketentuan EULA kepada pengguna dan tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakadilan.

Salah satu teori kebijakan publik yang relevan dengan masalah teori "proteksi anak" (child protection theory). Teori ini mengemukakan bahwa pemerintah dan masyarakat harus melindungi anak-anak dari konten-konten berbahaya dan merusak di internet dan media digital. Dalam konteks ini, kebijakan publik yang diambil dapat berupa pembatasan akses anak-anak terhadap konten yang tidak sesuai, seperti pornografi dan kekerasan, serta pengaturan konten-konten yang disajikan dalam media digital yang lebih aman bagi anak-anak.

Secara keseluruhan, penting bagi anak-anak dan remaja yang menjadi pengguna internet dan media digital untuk memahami EULA sebelum menyetujuinya. Hal ini akan membantu mereka untuk menghindari risiko dan bahaya yang terkait dengan penggunaan internet dan media digital serta menjaga privasi dan keamanan mereka sebagai pengguna.

Rekomendasi

Untuk mengatasi isu kontrak EULA yang dihadapi oleh anak-anak dan remaja, perlu adanya kerja sama antara orang tua, perusahaan, dan pemerintah. Beberapa saran yang dapat dilakukan antara lain:

1. Orang tua dan wali harus memberikan edukasi dan pengawasan yang lebih baik dalam penggunaan internet dan media digital oleh anak-anak dan remaja.
2. Perusahaan harus menyediakan kontrak EULA yang jelas dan mudah dipahami dan tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakadilan.
3. Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang kontrak EULA untuk melindungi hak privasi dan keamanan pengguna internet dan media digital.

4. Orang tua memanfaatkan mode orang tua atau melakukan penyadapan pada handphone anak untuk memantau aktivitas yang dilakukan oleh mereka. Dan orang tua bisa memblokir hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan.

3. Penerapan kebijakan Tunjangan Hari Raya Tahun 2023

Analisis Masalah

Pemberian THR tahun 2023 bagi ASN (PNS dan PPPK) sebagian besar sudah sesuai dengan SE No M/2/HK.04.00/III/2023 dan PP No 15 tahun 2023, namun bagi Non ASN atau PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) belum sepenuhnya sesuai dengan SE dan PP tersebut, salah satunya dikarenakan hal yang paling mendasar yaitu pembayaran besaran gaji yang belum sesuai dengan standar kelayakan hidup atau belum sesuai dengan UMK daerah tempat tinggal masing-masing pegawai.

Sebagai contoh, pada salah satu Perguruan Tinggi Negeri, yaitu Universitas Lampung masih terdapat besaran Gaji bagi pegawai Non PNS atau PPNPN yang belum sesuai dengan UMK Bandar Lampung. Pemberian THR juga tidak sesuai dengan besaran Gaji yang diterima pada bulan yang menjadi dasar pembayaran THR pada tahun 2023. Sebagai gambaran, gaji Pegawai pada bulan Maret 2023 adalah Rp. 2.500.000,00, sedangkan THR yang dibayarkan hanya Rp. 1.700.000,00. Setelah ditelusuri, penyebabnya adalah karena adanya keterbatasan anggaran, yaitu Pagu THR dibayarkan melalui Dana BLU, bukan dari Rupiah Murni.

Menurut narasumber, THR PPNPN dibayarkan melalui dana BLU disebabkan Gaji PPNPN yang beraneka ragam sesuai dengan masa kerja dan tingkat pendidikan sehingga dana rupiah murni yang dibatasi oleh kementerian, tidak mencukupi untuk membayar THR sebesar 1 bulan gaji. Dan dialihkan ke dana BLU yang perhitungannya disesuaikan dengan jumlah PPNPN yang telah memenuhi syarat untuk dibayarkan. Jumlah PPNPN yang bertambah dari tahun 2018 menjadi salah satu penyebab tidak mencukupinya pembayaran THR melalui dana Rupiah Murni. Data pada kementerian hanya mengakomodir jumlah PPNPN yang telah terdaftar sebelum tahun 2018. Diiringi dengan peraturan pemerintah tentang larangan pengangkatan pegawai honorer.

Rekomendasi

1. Pimpinan bisa mencari alternatif pembiayaan lain untuk membayarkan THR PPNPN
2. Melakukan perampingan PPNPN berdasarkan kebutuhan instansi
3. Melakukan peninjauan kembali besaran gaji PPNPN tendik dan PPNPN tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan pemerintah